



## Pengaruh Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dan Penganggaran terhadap Masyarakat Penerima Bantuan Sosial yang Terdampak Banjir

Yescenia Sigiro<sup>1\*</sup>, Yulce ketrina Karubuy<sup>2</sup>, Eki Monalisa Br Surbakti<sup>3</sup>, Suriyani br Ginting<sup>4</sup>, Yohanna Sitanggang<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Negeri Medan, Indonesia

[yesceniasigiro03@gmail.com](mailto:yesceniasigiro03@gmail.com)<sup>1</sup>, [Yulceketrina@gmail.com](mailto:Yulceketrina@gmail.com)<sup>2</sup>, [ekimonalisa6473@gmail.com](mailto:ekimonalisa6473@gmail.com)<sup>3</sup>,

[unjukmalem735@gmail.com](mailto:unjukmalem735@gmail.com)<sup>4</sup>, [yohannasitanggang246@gmail.com](mailto:yohannasitanggang246@gmail.com)<sup>5</sup>

\*Penulis Korespondensi: [yesceniasigiro03@gmail.com](mailto:yesceniasigiro03@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to analyze the impact of government expenditure development and government budgeting on the social assistance recipients affected by floods. The research approach uses a quantitative method with a total of 50 respondents selected through sampling techniques. Data processing was conducted using SPSS software with various statistical tests, including validity test, reliability test, multiple linear regression, t-test, and F-test. The results show that the development of government expenditure has a significant impact on the condition of the social assistance recipients. Additionally, government budgeting also has a significant impact on the effectiveness of social assistance distribution after the disaster. Simultaneously, both variables have a strong influence on the social assistance recipients, as reflected by the significant F-test value and the coefficient of determination (*R Square*) of 0.518. This means that 51.8% of the variation in the condition of social assistance recipients can be explained by the development of government expenditure and government budgeting. These findings highlight the importance of appropriate expenditure and budgeting policies to enhance the effectiveness of social assistance distribution, especially in disaster situations.

**Keywords:** Budgeting; Flooding; Government Expenditure; Public Policy; Social Assistance

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan pengeluaran pemerintah dan penganggaran pemerintah terhadap masyarakat penerima bantuan sosial yang terdampak banjir. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 50 orang yang dipilih melalui teknik sampling. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan berbagai uji statistik, antara lain uji validitas, reliabilitas, regresi linier berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi masyarakat penerima bantuan sosial. Selain itu, penganggaran pemerintah juga memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial pascabencana. Secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap masyarakat penerima bantuan sosial, yang tercermin dari nilai uji F yang signifikan dan nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,518. Artinya, 51,8% variasi kondisi masyarakat penerima bantuan sosial dapat dijelaskan oleh perkembangan pengeluaran pemerintah dan penganggaran pemerintah. Temuan ini menunjukkan pentingnya kebijakan pengeluaran dan penganggaran yang tepat guna meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial, terutama dalam menghadapi bencana.

**Kata Kunci:** Banjir; Bantuan Sosial; Kebijakan Publik; Penganggaran; Pengeluaran Pemerintah

### 1. LATAR BELAKANG

Bencana banjir merupakan salah satu peristiwa alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, ribuan rumah, fasilitas umum, serta sektor ekonomi lokal terdampak serius akibat tingginya curah hujan, kerusakan lingkungan, dan kurang optimalnya infrastruktur pengendalian banjir. Dalam situasi ini, peran pemerintah menjadi

sangat krusial, khususnya melalui pengeluaran pemerintah dan penganggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendorong stabilitas ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama saat terjadi kondisi darurat. Melalui mekanisme penganggaran, pemerintah menentukan besaran prioritas belanja yang ditujukan untuk penanganan bencana dan pemulihan sosial-ekonomi. Namun, efektivitas pengeluaran pemerintah dan penganggaran tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kecepatan penyaluran, dan kecukupan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir.

Masyarakat penerima bantuan sosial pasca-banjir umumnya menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kehilangan tempat tinggal, rusaknya aset produktif, menurunnya pendapatan, serta terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, bantuan sosial yang bersumber dari pengeluaran pemerintah menjadi instrumen vital untuk memulihkan kondisi masyarakat, mengurangi kerentanan, serta mempercepat proses pemulihan pascabencana. Namun demikian, dalam berbagai studi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan terkait ketidakefektifan penganggaran, keterlambatan penyaluran bantuan, ketidaksesuaian data penerima, hingga kurangnya evaluasi terhadap dampak bantuan sosial tersebut.

Melihat fenomena tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana perkembangan pengeluaran pemerintah dan penganggaran yang dilakukan pemerintah berpengaruh langsung terhadap kondisi masyarakat penerima bantuan sosial yang terdampak banjir. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam konteks penanganan bencana, khususnya dalam menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak banjir.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan penganggaran dan pemberian bantuan sosial yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam, khususnya banjir. Banjir tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik seperti hancurnya rumah, infrastruktur, dan fasilitas umum, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Setiap tahun, jumlah korban terdampak banjir terus meningkat, menandai bahwa penanganan dan mitigasi bencana masih membutuhkan perhatian serius. Dalam kondisi ini, pemerintah memegang peran strategis melalui pengeluaran pemerintah dan

perencanaan penganggaran yang diarahkan untuk pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak.

Secara teoritis, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menstabilkan perekonomian, dan memenuhi kebutuhan publik. Dalam konteks bencana banjir, pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk bantuan darurat, pembangunan kembali infrastruktur, serta program pemulihan sosial-ekonomi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengeluaran tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah merencanakan dan mengelola penganggaran secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk bantuan sosial, berbagai permasalahan sering muncul, seperti ketidaktepatan data penerima, keterlambatan distribusi bantuan, tidak meratanya penyaluran, hingga adanya indikasi penyalahgunaan anggaran. Kondisi ini menghambat masyarakat untuk memperoleh haknya secara maksimal dan memperlambat proses pemulihan pascabencana. Selain itu, perkembangan pengeluaran pemerintah sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak, sehingga muncul kesenjangan antara besarnya anggaran yang digelontorkan dan dampak yang dirasakan langsung oleh penerima bantuan sosial.

Masyarakat terdampak banjir juga menghadapi penurunan pendapatan, hilangnya aset produktif, dan meningkatnya beban pengeluaran akibat kerusakan yang mereka alami. Oleh karena itu, bantuan sosial yang diberikan pemerintah seharusnya mampu memberikan perlindungan yang memadai untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi mereka. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial tersebut masih perlu dievaluasi, khususnya terkait keterkaitan antara besarnya pengeluaran pemerintah, proses penganggaran, dan dampak yang diterima oleh masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk meneliti pengaruh perkembangan pengeluaran pemerintah dan penganggaran terhadap kondisi masyarakat penerima bantuan sosial yang terdampak banjir. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek penganggaran yang perlu diperbaiki agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan efektif.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas pengeluaran pemerintah dan penganggaran dalam konteks penanganan bencana

banjir, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan bantuan sosial di masa mendatang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mengalami peningkatan frekuensi dan intensitas banjir di berbagai daerah. Fenomena ini tidak hanya dipicu oleh curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim, tetapi juga oleh menurunnya kualitas lingkungan seperti penyempitan daerah resapan air, sedimentasi sungai, dan buruknya tata kelola drainase. Akibatnya, jumlah masyarakat yang terdampak banjir semakin bertambah setiap tahunnya, dan kebutuhan terhadap bantuan sosial dari pemerintah semakin meningkat.

Di tengah meningkatnya jumlah kejadian banjir, pemerintah sebenarnya telah meningkatkan alokasi pengeluaran dan anggaran untuk bantuan sosial, baik dalam bentuk bantuan darurat, perbaikan rumah, jaminan hidup sementara, maupun program pemulihan ekonomi. Namun, fenomena yang muncul menunjukkan bahwa kondisi di lapangan tidak selalu sejalan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Banyak masyarakat terdampak banjir masih mengeluhkan lambatnya penyaluran bantuan, ketidaksesuaian data penerima, serta minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses distribusi bantuan.

Fenomena lainnya adalah adanya ketimpangan antara wilayah yang memiliki akses pelayanan publik yang baik dengan daerah terpencil. Di beberapa daerah perkotaan, bantuan sosial dapat tersalurkan dengan cepat karena dukungan infrastruktur dan data kependudukan yang lebih lengkap. Namun, di wilayah pedesaan atau daerah pinggiran, proses penyaluran bantuan sering kali terkendala aksesibilitas, kurangnya validasi data, dan lemahnya sistem pendataan berbasis teknologi. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat terdampak banjir tidak mendapatkan bantuan secara merata.

Selain itu, masyarakat mulai menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah karena belum sepenuhnya pulih dari kerugian ekonomi pascabencana. Pendapatan mereka menurun, pekerjaan terhenti, dan sebagian besar aset produktif rusak akibat banjir. Dalam situasi ini, bantuan sosial menjadi satu-satunya sumber daya untuk bertahan hidup. Namun, fenomena yang muncul adalah bantuan sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum, sehingga memperpanjang periode pemulihan masyarakat terdampak.

Di sisi lain, terdapat fenomena baru berupa peningkatan transparansi publik terhadap pengeluaran pemerintah, terutama setelah masyarakat dapat mengakses informasi anggaran melalui platform digital pemerintah. Masyarakat kini lebih kritis terhadap efektivitas anggaran bansos, terutama ketika ada ketidaksesuaian antara besarnya anggaran dan manfaat yang

dirasakan di lapangan. Hal ini menimbulkan tuntutan agar mekanisme penganggaran dan penyaluran bantuan sosial diperbaiki agar lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran pemerintah dan anggaran bantuan sosial terus meningkat, tantangan dalam penyaluran, akurasi data, serta efektivitas bantuan masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Kondisi ini menjadi dasar pentingnya penelitian yang mengkaji pengaruh perkembangan pengeluaran pemerintah dan penganggaran terhadap masyarakat penerima bantuan sosial yang terdampak banjir.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di lapangan, penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara besarnya pengeluaran pemerintah serta penganggaran bantuan sosial dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat terdampak banjir. Meskipun pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan bencana dan bantuan sosial, berbagai persoalan seperti keterlambatan penyaluran, ketidaktepatan sasaran penerima, dan tidak meratanya distribusi bantuan masih menjadi kendala yang sering muncul. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan utama mengenai sejauh mana pengeluaran pemerintah dan mekanisme penganggaran benar-benar memengaruhi kesejahteraan masyarakat penerima bantuan sosial pascabencana banjir.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada upaya untuk memahami dan menganalisis bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah serta proses penganggaran berkontribusi terhadap efektivitas bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya menjawab permasalahan mengenai apakah peningkatan pengeluaran pemerintah benar-benar dapat meningkatkan ketepatan dan kecukupan bantuan yang diterima masyarakat, serta apakah perencanaan dan pengelolaan penganggaran yang dilakukan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas dan keberhasilan penyaluran bantuan sosial di daerah terdampak banjir.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk menguji besarnya pengaruh perkembangan pengeluaran pemerintah dan penganggaran terhadap kondisi masyarakat penerima bantuan sosial yang terdampak banjir. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh hasil yang terukur, objektif, dan dapat dianalisis secara statistik. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 1–5 kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial akibat banjir. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti masyarakat yang benar-benar menerima

bantuan sosial pada periode banjir yang terjadi di daerah penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel utama, yaitu dua variabel independen (X1 dan X2) serta satu variabel dependen (Y). Variabel-variabel tersebut disusun untuk mengukur sejauh mana perkembangan pengeluaran pemerintah dan proses penganggaran berpengaruh terhadap kondisi masyarakat penerima bantuan sosial yang terdampak banjir.

Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dan diuji terlebih dahulu untuk memastikan validitas serta reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan menggunakan analisis korelasi item-total dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS melalui beberapa tahap. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik data dan persepsi responden terhadap masing-masing variabel. Selama proses penelitian, peneliti tetap memerhatikan etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas responden dan memastikan bahwa partisipasi bersifat sukarela. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

##### ***Uji Validitas***

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap seluruh item pernyataan pada variabel Perkembangan Pengeluaran Pemerintah (X1), Penganggaran Pemerintah (X2), dan Dampaknya terhadap Masyarakat Penerima Bantuan Sosial (Y), diperoleh nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel ( $0,279$  untuk  $n = 50$ ). Seluruh indikator pada ketiga variabel menunjukkan nilai korelasi antara  $0,421$  hingga  $0,812$ . Temuan ini menegaskan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner memiliki tingkat validitas yang baik dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Tidak terdapat item yang harus dieliminasi karena semuanya memenuhi kriteria valid.

**Tabel 1.** Hasil Uji Validitas

<b>Variabel</b>	<b><math>r</math> Hitung</b>	<b><math>r</math> Tabel (0,279)</b>	<b>Keterangan</b>
X1 – Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	0,612	0,279	Valid
X1 – Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	0,701	0,279	Valid
X1 – Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	0,584	0,279	Valid
X1 – Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	0,742	0,279	Valid
X1 – Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	0,657	0,279	Valid
X2 – Penganggaran Pemerintah	0,543	0,279	Valid
X2 – Penganggaran Pemerintah	0,688	0,279	Valid
X2 – Penganggaran Pemerintah	0,812	0,279	Valid
X2 – Penganggaran Pemerintah	0,591	0,279	Valid
X2 – Penganggaran Pemerintah	0,629	0,279	Valid
Y – Penerima Bantuan Sosial Terdampak Banjir	0,421	0,279	Valid

Y – Penerima Bantuan Sosial Terdampak Banjir	0,736	0,279	Valid
Y – Penerima Bantuan Sosial Terdampak Banjir	0,654	0,279	Valid
Y – Penerima Bantuan Sosial Terdampak Banjir	0,812	0,279	Valid
Y – Penerima Bantuan Sosial Terdampak Banjir	0,589	0,279	Valid

### ***Uji Reliabilitas***

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,874, variabel X2 sebesar 0,861, dan variabel Y sebesar 0,892. Ketiga nilai tersebut berada di atas batas minimal reliabilitas yaitu 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan sangat reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner secara konsisten mampu mengukur variabel yang diteliti dan dapat dipercaya sebagai alat ukur penelitian.

**Tabel 2.** Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Minimal	Keterangan
X1 – Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	0,874	0,60	Reliabel
X2 – Penganggaran Pemerintah	0,861	0,60	Reliabel
Y – Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Terdampak Banjir	0,892	0,60	Reliabel

### ***Uji T***

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Perkembangan Pengeluaran Pemerintah (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 3,487 dengan signifikansi 0,001, sehingga dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap masyarakat penerima bantuan sosial yang terdampak banjir. Variabel Penganggaran Pemerintah (X2) juga memiliki nilai t hitung sebesar 2,941 dengan signifikansi 0,005. Karena kedua nilai signifikansi < 0,05, maka baik X1 maupun X2 terbukti berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Temuan ini menjelaskan bahwa baik pengeluaran pemerintah maupun perencanaan anggaran berperan nyata dalam menentukan efektivitas bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir.

**Tabel 3.** Hasil Uji T

Variabel	t Hitung	t Tabel (2,011)	Sig.	Keterangan
X1 → Y	3,487	2,011	0,001	Signifikan
X2 → Y	2,941	2,011	0,005	Signifikan

### ***Uji F***

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. Hasil analisis menunjukkan nilai F hitung sebesar 24,761 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan dinyatakan signifikan. Artinya, perkembangan pengeluaran pemerintah dan sistem penganggaran secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat terhadap kondisi masyarakat penerima bantuan sosial yang terkena dampak banjir. Hal ini mengindikasikan

bahwa kebijakan fiskal pemerintah memiliki peranan strategis dalam penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

**Tabel 4.** Hasil Uji F

Model	F Hitung	F Tabel (3,19)	Sig.	Keterangan
X1 & X2 → Y	24,761	3,19	0,000	Signifikan

#### *Uji Autokorelasi*

**Tabel 5.** Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson	Batas DW (du – 4-du)	Keterangan
1	1,874	du = 1,65 ; 4 – du = 2,35	Tidak terjadi autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson, diperoleh nilai DW sebesar 1,874. Nilai ini berada di antara batas atas ( $du = 1,65$ ) dan ( $4 - du = 2,35$ ). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi, baik positif maupun negatif. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dapat dinyatakan memenuhi asumsi klasik terkait autokorelasi sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

#### *Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )*

**Tabel 6.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Keterangan
1	0,720	0,518	0,498	3,214	Pengaruh kuat

Berdasarkan tabel uji koefisien determinasi, nilai R Square sebesar 0,518 menunjukkan bahwa variabel Perkembangan Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Penganggaran Pemerintah (X2) mampu menjelaskan 51,8% variasi dari variabel Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Terdampak Banjir (Y). Sementara itu, sisanya 48,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,498 menguatkan bahwa model regresi memiliki kemampuan prediktif yang baik dan stabil untuk sampel penelitian.

#### **Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Perkembangan Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Penganggaran Pemerintah (X2) terhadap Masyarakat Penerima Bantuan Sosial yang Terdampak Banjir (Y). Hasil analisis kuantitatif menggunakan SPSS menunjukkan adanya hubungan dan pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan.

#### ***Pengaruh Perkembangan Pengeluaran Pemerintah (X1) terhadap Masyarakat Penerima Bantuan Sosial (Y)***

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai t hitung 3,487 dengan nilai signifikansi 0,001, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menegaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kondisi masyarakat penerima bantuan sosial yang terdampak banjir.

Dalam konteks penanganan bencana, pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat biasanya dialokasikan untuk keperluan darurat, seperti penyediaan logistik, perbaikan fasilitas sementara, evakuasi, hingga bantuan tunai. Ketika alokasi pengeluaran pemerintah meningkat dan disalurkan secara tepat, maka kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi, sehingga memengaruhi stabilitas sosial dan pemulihan ekonomi keluarga korban. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah terbukti berperan penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat pada saat dan setelah terjadi bencana banjir.

### ***Pengaruh Penganggaran Pemerintah (X2) terhadap Masyarakat Penerima Bantuan Sosial (Y)***

Variabel penganggaran pemerintah (X2) memperlihatkan nilai t hitung 2,941 dengan nilai signifikansi 0,005, sehingga X2 juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y. Temuan ini menunjukkan bahwa proses penganggaran yang terencana, transparan, dan tepat sasaran menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Penganggaran yang baik mencerminkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana serta memperkuat mekanisme distribusi bantuan. Ketika proses penyusunan anggaran memperhatikan aspek kebutuhan riil masyarakat, prioritas wilayah rawan banjir, serta ketepatan waktu pembagian dana, maka kualitas penanganan bencana meningkat. Dampak positifnya akan terlihat pada percepatan pemulihan masyarakat terdampak, termasuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal sementara.

### ***Pengaruh Perkembangan Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Penganggaran Pemerintah (X2) secara Simultan terhadap Masyarakat Penerima Bantuan Sosial (Y)***

Melalui uji F, diperoleh nilai F hitung 24,761 dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti kedua variabel bebas X1 dan X2 secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hal ini sejalan dengan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,518, yang menunjukkan bahwa 51,8% variasi kondisi masyarakat penerima bantuan sosial dapat dijelaskan oleh perkembangan pengeluaran pemerintah dan penganggaran pemerintah. Sisanya 48,2% dipengaruhi faktor lain seperti tingkat kesiapsiagaan masyarakat, kondisi geografis, kualitas koordinasi antar lembaga, serta mitigasi bencana yang dilakukan secara mandiri. Temuan ini menguatkan bahwa kombinasi antara besarnya pengeluaran pemerintah dan kualitas penganggaran memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pemberian bantuan sosial. Semakin baik perencanaan anggaran dan semakin besar dana yang dialokasikan untuk penanganan banjir, maka semakin optimal pula pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa baik perkembangan pengeluaran pemerintah maupun sistem penganggaran memiliki kontribusi signifikan terhadap

kondisi masyarakat penerima bantuan sosial yang terdampak banjir. Model regresi menunjukkan pengaruh yang kuat dan relevan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah baik dalam perencanaan anggaran maupun realisasi pengeluaran memiliki peran langsung dalam percepatan pemulihan masyarakat dan pemerataan bantuan sosial pascabencana.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh perkembangan pengeluaran pemerintah dan penganggaran terhadap masyarakat penerima bantuan sosial yang terdampak banjir, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kondisi masyarakat penerima bantuan sosial. Semakin besar alokasi pengeluaran yang direalisasikan pemerintah untuk penanganan banjir, semakin baik pula pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan masyarakat terdampak.

Proses penganggaran pemerintah juga terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial. Penganggaran yang tepat, terencana, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran dan membantu mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Secara simultan, perkembangan pengeluaran pemerintah dan penganggaran pemerintah memberikan pengaruh yang kuat terhadap kondisi masyarakat penerima bantuan sosial. Hal ini ditunjukkan melalui nilai uji F dan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan lebih dari separuh variasi perubahan kondisi masyarakat terdampak banjir.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak banjir sangat ditentukan oleh kebijakan fiskal pemerintah, khususnya terkait pengeluaran dan penganggaran yang tepat, efektif, serta sesuai prioritas kebutuhan masyarakat. Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan anggaran dan realisasi pengeluaran yang terarah sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam situasi darurat bencana.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, M. R. (2022). *Efektivitas penyaluran bantuan korban banjir di Kabupaten Bantaeng tahun 2020* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Angraini, R. (2025). *Peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial pasca bencana banjir di Kabupaten Luwu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Palopo).
- Asmuni, A. (2020). Gotong royong saat pandemi: Ketepatan bantuan sosial bagi terdampak. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 3(1), 20-42. <https://doi.org/10.37849/mipi.v3i1.191>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2023). *Laporan tahunan penanggulangan bencana di Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Hartanti, S. M., Rahman, F., Farida, A., & Manaqib, U. (2021). Urgensi peralihan dana desa untuk penanggulangan bencana Covid-19. *SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 1(1), 21-48. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.65>
- Herlambang, A. B., & Wicaksono, I. (2025). Evaluasi kebijakan bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Slawu, Kabupaten Jember. *Interelasi Humaniora*, 1(4), 264-275.
- Iin Alfani Rusdin, I. A. R. (2025). *Implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial (KUBE) pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).
- Ikhwandari, F. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), dan Jumlah Penduduk Miskin (Jpm) terhadap alokasi belanja desa bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak, dan darurat desa tahun 2020 (Studi Empiris Desa-Desa di Kabupaten Sukoharjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Irwan, I., & Rusmini, R. (2024). *Pengendalian bantuan logistik korban bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan fiskal dalam penanganan bencana alam*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Mulyanto, E. (2021). Analisis efektivitas belanja negara dalam penanggulangan bencana alam. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 145–158.
- Ramdani, S. A. (2024). Dampak belanja subsidi dan bantuan sosial dari APBD terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 57-77. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.524>
- Suryani, T., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh bantuan sosial terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 33–45.
- World Bank. (2021). *Social protection and disaster recovery in developing countries*. Washington, DC: World Bank.
- Zega, E. L. C. (2020). Peranan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 secara berkeadilan di Desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.